

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan Indonesia, terutama di bidang kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah sedang berusaha meningkatkan jumlah Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan dan menjaga perekonomian nasional, karena EMKM merupakan sebuah badan usaha yang berdiri sendiri dan tidak terlalu banyak melibatkan pihak eksternal, maka EMKM cenderung dapat mempertahankan diri ditengah krisis perekonomian.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Institute of Chartered Accountants* merupakan sebuah organisasi resmi yang menaungi profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan forensik, akuntan pajak, dan lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan, yaitu untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Untuk menunjang tujuan didirikannya organisasi ini, IAI juga turut andil dalam merumuskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ada di Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia diadopsi oleh IAI dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS). IFRS sendiri merupakan

standar pencatatan keuangan yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *International Accounting Standards Board (IASB)*. IAI turut mengadopsi IFRS karena Indonesia termasuk sebagai anggota dari *International Federation of Accountants (IFAC)* yang merupakan sebuah organisasi global bagi profesi akuntansi. Tujuan umum dari dibentuknya SAK adalah untuk keseragaman laporan keuangan entitas dan untuk dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Ada empat pilar utama SAK di Indonesia. Pertama adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)-IFRS yang merupakan SAK bagi entitas yang bersifat umum seperti emiten, perusahaan publik, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan asuransi. Kemudian yang kedua adalah SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang merupakan anak dari SAK-IFRS karena mengadopsi IFRS untuk usaha kecil menengah (UKM) sebagai acuan penerapan standar. Yang ke tiga adalah PSAK-Syariah yang membentuk sebuah standar berbasis syariah yang pada umumnya dipakai oleh lembaga-lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, badan zakat, pegadaian syariah, dan sebagainya. Yang terakhir merupakan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah untuk diterapkan oleh entitas milik pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dukungan IAI terhadap program pemerintah untuk membangun EMKM, mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun sebuah standar yang di adaptasi ulang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah. Undang-undang No.20

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi acuan dalam mendefinisikan rentang kuantitatif EMKM. Standar ini disebut dengan SAK-EMKM yang efektif mulai tanggal 1 Januari 2018.

Penerapan sistem akuntansi masih belum dimanfaatkan oleh banyak poliklinik di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Umumnya, hal ini terjadi karena faktor kebiasaan, karena laporan tahun sebelumnya sudah dicatat manual, maka akan menyusahkan apabila karyawan harus diajarkan sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Kenyataannya penerapan sistem akuntansi sendiri akan memberikan banyak manfaat bagi pengelola Poliklinik, terutama dalam menentukan beban layanan kesehatan dan pendapatan yang diperoleh. Tentunya informasi ini sangat berguna untuk pengendalian pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Poliklinik.

CV. Pratama Hanna Kasih sebagai salah satu perusahaan pelayanan kesehatan berupa Poliklinik yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di kota medan, seperti organisasi lain pada umumnya, juga menerapkan sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang diterapkan di klinik tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, padahal sebagai salah satu kepala jejaring yang bekerjasama dengan BPJS, yang merupakan salah satu badan usaha yang diawasi langsung oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), tentunya terdapat tuntutan untuk memberikan rekap laporan bulanan. Berdasarkan survei dan observasi sementara pada CV tersebut, perusahaan ini masih menggunakan sistem secara manual, dimana setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran perusahaan akan dicatat secara terpisah oleh bagian keuangan atau kasir yang kemudian pada akhir bulan akan direkap dan disandingkan dengan pos

pos lainnya untuk mengetahui total pendapatan. Kegiatan tersebut memerlukan sistem yang terstruktur, baik secara manajemen ataupun keuangan.

Sistem manual ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah informasi yang dibutuhkan tidak dapat disajikan dengan cepat, tepat dan akurat karena memerlukan proses yang cukup rumit, sebab sebelum dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan, semua catatan terkait harus dikumpulkan. Catatan bisa menjadi sangat banyak karena terus bertambah setiap waktunya. Sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk dapat menemukan aliran kas masuk dan keluar tertentu. Sistem ini juga tidak efisien, mengingat akan ada beberapa data yang dicatat secara berulang sehingga akan memerlukan media pencatatan yang dalam hal ini merupakan kertas yang banyak untuk menampung semua data tersebut, tempat penyimpanan semua catatan, dan beban pembelian media. Penentuan harga pokok produksi, beban yang telah dimanfaatkan dan pendapatan nyata juga sulit di lacak dengan menggunakan sistem manual.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik melakukan penilitan yang berjudul **“Penyusunan dan Penerapan Sistem Akuntansi Sederhana Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Pada Laporan Keuangan CV. Klinik Pratama Hanna Kasih”** untuk dapat memberikan kemudahan kepada objek penelitian berupa desain perekaman pencatatan keuangan dalam bentuk *file excel*, dan anjuran sistem pencatatan laporan keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana bentuk sistem akuntansi sederhana yang sesuai diterapkan di CV. Pratama Hanna Kasih berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem akuntansi sederhana berbasis SAK EMKM yang sesuai untuk diterapkan pada organisasi pelayanan kesehatan berupa Poliklinik.

## **1.4 Manfaat Pelaksanaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi CV. Pratama Hanna Kasih.**

Perusahaan dapat memiliki sistem akuntansi berbasis SAK EMKM untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti; pemilik, administrasi perpajakan, BPJS, dll.

#### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan SAK EMKM pada organisasi pelayanan kesehatan berupa Poliklinik.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pembaca sebagai penambah pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam lingkup yang sama.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada entitas pelayanan kesehatan berupa Poliklinik.

### **1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah**

Data yang digunakan sebagai data utama adalah data transaksi Maret periode tahun 2018 dan sebagai data tambahan adalah data keuangan pada bulan lainnya untuk didapatkan contoh transaksi yang mewakili setiap transaksi yang ada di Klinik Pratama Hanna Kasih. Transaksi yang dimaksud melingkupi transaksi penerimaan pendapatan dari rawat inap, rawat jalan, imunisasi dan obat-obatan dan seluruh pengeluaran klinik.